

## SEAPAC Diharapkan Mendorong Kinerja DPR Lebih Baik dan Bersih

Selasa, 26/08/2014 - 22:19

JAKARTA, (PRLM).- Direktur Advokasi PSHK Ronald Rofiandri menyatakan keawatirannya dengan dihapuskannya Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR periode mendatang. DPR RI ke depan akan makin buram. Sebab dengan dihapusnya BAKN ini patut dipertanyakan, sejauh mana komitmen DPR RI untuk memberantas korupsi, tegas Ronald pada diskusi 'Memberantas Korupsi Melalui Legislasi' bersama Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Siswono Yudhohusodo di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2014).

Hal lain yang juga menambah kekhawatiran Ronald, harus ada izin dari Mahkamah Dewan (MK) DPR RI ketika seorang anggota harus diperiksa KPK. "Jadi, DPR jangan berhenti sampai SEAPAC, tapi harus membentuk kaukus anti korupsi," ungkapnya.

Dikatakan, jika 560 anggota DPR RI terpilih yang akan dilantik pada 1 Oktober mendatang itu sudah memiliki portofolio dan track record, maka dari situ bisa dilihat keperpihakannya pada rakyat. "Jangan sampai setelah dilantik, mereka malah tidak tahu mandat rakyat yang harus dijalankan. Padahal, fasilitas dan gaji meningkat. Kalau kinerjanya sama dengan periode 2009-2014, maka merupakan potret buram bagi DPR mendatang," kata Ronald.

Selain itu sekitar 70 persen pendidikan anggota DPR RI 2009-2014 lebih tinggi dan lebih muda, tapi kinerjanya buruk. "Ternyata pendidikan dan usia produktif tidak menjamin akan kinerja yang baik. Apalagi tidak mempunyai pengalaman di masyarakat dan tidak mempunyai komunikasi yang baik dengan lembaga pendidikan tinggi untuk mendukung tugasnya di DPR RI. Kalau semua itu tidak diperbaiki, maka ketiga fungsi DPR RI (legislasi, pengawasan, dan anggaran) akan tetap rentan korupsi," pungkasnya.

Sementara Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR RI Siswono Yudhohusodo mengakui sangat prihatin dengan merosotnya tingkat kepercayaan rakyat pada DPR RI akibat berbagai pelanggaran etika, ketidaksiplinan, kinerja yang buruk, dan khususnya keterlibatan beberapa anggota dalam kasus korupsi, yang juga terjadi pada lembaga tinggi negara yang lain. Kalau itu dibiarkan maka akan membahayakan negara. Padahal, dunia melalui The Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) sudah berkomitmen untuk memberantas korupsi, tegas Siswono.

"Kita berharap kinerja DPR RI 2014-2019 akan lebih baik dan bersih dari korupsi dibanding DPR RI periode sekarang. Tapi, waktu yang akan menentukan. Untuk itu DPR RI selaku pimpinan Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC), akan terus berusaha untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi itu," tegas Siswono lagi.

Presiden Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC), Marzuki Alie dan Ketua Gugus Tugas Nasional Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) Indonesia, Pramono Anung Wibowo, juga telah mengundang parlemen di kawasan Asia Tenggara, terlebih yang memiliki Gugus Tugas GOPAC di Parlemennya untuk hadir di SEAPAC Board Meeting yang akan membicarakan program-program penguatan gerakan anti korupsi di parlemen kawasan Asia Tenggara.

Workshop diadakan dengan tema "Stronger Ethics and Integrity: Path for Parliament to Combat Corruption" yang akan diselenggarakan pada tanggal 28-29 Agustus 2014 di Jakarta.

Menurut Siswono, merosotnya tingkat kepercayaan rakyat pada wakilnya di DPR RI setidaknya disebabkan oleh proses rekrutmen Caleg DPR RI oleh partai yang tidak berdasarkan integritas, kompetensi, kapabilitas, dan bukan putra terbaik. "Rakyat juga memiliki andil karena memilih Caleg yang transaksional, politik uang. Tapi, bagi negara yang sudah maju peradabannya, maka pelaku korupsi akan menghukum dirinya sendiri sebelum aturan ditegakkan. Seperti mundur, dan bahkan bunuh diri," ujarnya. (Sjafri Ali/A-88)\*\*\*